

TEMPO

MAJALAH BERITA MINGGUAN EDISI ONLINE

Search

| Advance search

| Registration

| Help

| About us

Daftar Isi

Edisi. 06/XXXV/03 - 9 April 2006

Halaman utama

Album

Bahasa

Buku

Catatan Pinggir

Ekonomi & Bisnis

Etalase

Film

Hiburan

Hukum

Ilmu & Teknologi

Inovasi

Kartun

Kesehatan

Kolom

Kriminalitas

Luar Negeri

Musik

Nasional

Olahraga

Opini

Pendidikan

Peristiwa

Perjalanan

Pokok & Tokoh

Selingan

Seni Rupa

Surat

Wawancara

Arsip

 english

tempointeraktif

koran

Pusat Data

Tempophoto

Selamat Datang

Menu Pribadi Ubah

Profil Ubah

Password Kembali

Logout

Buku

Tragedi Terorisme Orde Baru

Buku yang dapat dijadikan model tentang keseimbangan teori-teori sosial mutakhir dengan analisis berbasis empiris dalam mendekati sejarah kontemporer Indonesia.

State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging

Penulis : Ariel Heryanto

Penerbit: Routledge, London, 2006

Tebal : 242 hlm

Ada terorisme swasta, ada -te-ror-isme negara. Dan Ariel- Her-yanto—dosen senior di Mel-bourne Institute of Asian Lan-guages and Societies—dalam bu-kunya, State Terrorism and Poli-tical Identity in Indonesia: Fatally Belonging, mengupas yang kedua.

Sebenarnya, untuk mencipta-kan- identitas sebuah negara stabil-, Indo-nesia di bawah Soeharto, misal-nya, mempunyai undang-undang antisubversi. Tapi itu saja tak cukup. Serangkaian kampanye di-sponsori negara untuk mencipta-kan dan mengembangkan teror terhadap warganya. Dan skenario yang berangkat dari penanaman rasa ngeri itu pun bergerak.

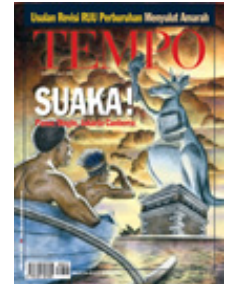
Korban—kelompok atau pribadi- tertentu—(dianggap) mewakili-kelompok yang lebih besar. Kekerasan sengaja dipamerkan dan disiarkan berulang-ulang untuk melestarikan rasa takut dan saling curiga. Selanjutnya masyarakat sen-diri menyebarkan kisah horor itu, yang kadang-kadang juga di-tambah-tambahi, yang pada gi-lir-an-nya akan menakutkan mereka juga.

Ariel mengakui konsep "negara" itu sendiri bermasalah. Ia menggunakan pengertian Weber: a system of authori-ty that has legitimate monopoly over institutionalized violence in a given territory. Ia memodifikasi istilah ini dengan konsep neo-Marxis mengenai hegemoni, juga menambahkan aspek internasional seperti militer di Indonesia era Orde Baru yang mendapat dukungan Amerika Serikat.

Ariel juga menunjukkan terorisme negara tak hanya terjadi pada negara komunis, sosialis, dan otoriter. Negara yang menganut paham "demokrasi liberal", termasuk AS, terutama sejak 1980-an melakukannya. Perbedaannya hanya pada ruang lingkup, intensitas, lama, dan gaya.

Majalah Tempo

06/XXXV/03 - 9 April 2006



Berita lainnya

- UU Tenaga Kerja Akan Diamandemen - 01 Apr 2006 | 18:16 WIB
- Awak Kapal Cengkeh Belum Ditemukan - 01 Apr 2006 | 18:10 WIB
- Gempa di Kepulauan Talaud - 01 Apr 2006 | 17:18 WIB
- Waspada Merapi - 01 Apr 2006 | 17:01 WIB
- Kepala Desa Ancam Akan Duduki Departemen Dalam Negeri - 01 Apr 2006 | 14:52 WIB
- Karyawan Toserba Yogya Protes - 01 Apr 2006 | 12:54 WIB
- Pemerintah Bantah Akan Kekang Pers - 01 Apr 2006 | 06:17 WIB
- ICW Kritik Kunjungan DPR ke Luar Negeri - 01 Apr 2006 | 05:28 WIB
- Walhi Minta Pemerintah Transparan - 01 Apr 2006 | 04:08 WIB
- Warga Jambi Keluhkan Kelangkaan Gas - 01 Apr 2006 | 01:47 WIB

> **index berita**

Tapi State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging berbicara tentang kasus Indonesia. Selama masa Orde Baru, berbagai kelompok masyarakat telah menjadi korban seperti preman (kasus pembunuhan misterius 1980-an) dan kelompok Islam (kasus Woyla, Tanjung Priok, dan Talangsari). Namun, teroris-me yang paling lama dan paling intensif adalah teror terhadap mereka yang dianggap terlibat peristiwa 1965.

Diawali dengan pembantaian se-tengah- juta (menurut penulis buku ini sekitar satu juta) dan penahanan ratusan ribu orang lainnya, pencabut-an paspor warga Indonesia di luar ne-geri pasca-1965, pembuangan ke Pulau Buru (1969-1979), dilanjutkan de-ngan pemberian stigma terhadap korban 1965 dan keluarganya. Pada 1981, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang mereka dan keluarga untuk menjadi pegawai negeri, anggota militer dan polisi, dan jabatan strategis lainnya di masyarakat.

Buku ini memperlihatkan pe-nguasaan penulis terhadap teori mutakhir dan kemampuan analisis- yang mendalam, sungguh pun terkesan ia sangat berhati-hati menarik kesimpulan. Paling sedikit ada dua aspek yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu keterkaitan terorisme dengan dukung-an kelompok masyarakat dan ko-neksi antara terorisme dan kapi-talisme.

Untuk kasus 1965, terorisme negara itu tidak hanya dilakukan aparat, tapi juga didukung oleh kelompok masyarakat. Mereka men-jadi "pelaku" dalam peristiwa- 1965, meski juga menjadi "korban" dalam periode berikutnya. Akar konflik ini tentu bisa ditelusuri pada periode setelah Indonesia merdeka (peristiwa Madiun 1948, rivalitas politik dalam Pemilu 1955, aksi sepihak PKI, dan seterusnya). Di Aceh, Jenderal Ishak Juarsa meminta pendapat ulama setelah meletus G-30-S. Ulama Aceh mengeluarkan fatwa bahwa "aliran komunisme haram dan anggota partai ini kafir" (prasaran Tgk Abdullah Ujong Rimba, 1965). Fatwa senada juga dikeluarkan oleh Muhammadiyah, November 1965 (makalah Hasan Ambary, 2001).

Alhasil, inilah buku yang dapat dijadikan model tentang keseimbangan antara teori-teori sosial mutakhir dan analisis berbasis empiris untuk mengkaji sebuah peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia.

Dr Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI

| Registrasi | Help | About us

copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas

Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data